

MERAWAT KEBANGSAAN, SEBAGAI SEBUAH GERAKAN BERSAMA



Prt Alexander H I Irhinas

Merawat Kebangsaan Sebagai Sebuah Jalan Senyap (?)

Setelah melayani Kebaktian Umum I di salah satu jemaat GKI pada Minggu 13 Mei 2018, saya membuka HP dan membaca salah satu pesan *whatsapp* dari seorang sahabat, yang akrab saya panggil Kang Jufri. Isi pesannya: "Selamat Hari Minggu Pak Pendeta, atas nama umat Islam, saya mohon maaf atas apa yang terjadi di Surabaya pagi ini, tolong sampaikan kepada umat pak pendeta, bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'Alamiin*, agama yang penuh rahmat dan damai. Para pelaku teror di Surabaya ini bukanlah umat Islam yang sesungguhnya. Mari kita segera buat literasi, aksi damai, dll untuk menyikapi apa yang terjadi pagi ini." Demikianlah isi pesan dari Kang Jufri atau Gus Jufri atau Muhammad Jufri, Panglima GP Ansor Kota Bekasi.

Dari pesan tersebutlah baru saya mencari tahu, bahwa ternyata di pagi itu terjadi teror bom di Surabaya, yang berlokasi di tiga gereja, yakni di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Jl. Ngagel, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jl. Arjuno, dan GKI Jl. Diponegoro. Setelah beritanya semakin viral, muncullah beragam respons dari masyarakat, mulai dari yang mendoakan, mengutuk, sekadar berbagi video dan gambar kejadian di sosial media, atau bahkan mengatakan itu adalah pengalihan isu.

Terlepas dari beragam respons yang muncul, namun tindakan terorisme ini telah menjadi masalah kebangsaan. Masalah kita bersama. Bukan hanya menjadi masalah ketiga gereja yang menjadi lokasi pengeboman, atau masalah ketiga sinode tersebut. Bukan hanya masalah NU atau Muhammadiyah, dua organisasi Islam yang kerap terdepan menyikapi isu kebangsaan. Bukan hanya masalah TNI/ Polri. Bukan hanya masalah Surabaya, tapi masalah Indonesia!

Dalam kondisi ini, maka Gereja perlu memeriksa diri: Apakah berbagai upaya merawat kebangsaan di Indonesia pada saat ini sudah menjadi pergumulan, panggilan, dan gerakan kita bersama sebagai sebuah Gereja? Atau masih menjadi sebuah jalan senyap dan perjuangan yang bersifat insidental dan individual?

Insidental, karena perjuangan merawat kebangsaan, baru bergelora ketika eksistensi gereja kita diganggu oleh pihak lain? Sedangkan jika gereja lain, agama lain, atau kelompok lain yang eksistensinya diganggu seolah bukan menjadi "urusanku"? Individual, karena merawat kebangsaan hanya menjadi urusan mereka anggota jemaat yang gemar soal politik dan kebangsaan, sedangkan bagi mereka yang tidak terlalu tertarik akan wacana merawat kebangsaan, bicara soal politik dan kebangsaan dinilai memusingkan dan tidak mempunyai masa depan.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tanggal 27 Juni 2018 lalu pun masih muncul kalimat yang mengatakan: "Gereja *'gak* usah macam-macam bicara soal politik dan kebangsaan, nanti membangunkan macan tidur. Selama kita bisa beribadah dengan tenang, ya nikmati saja."

Entah siapa yang dimaksud oleh yang bersangkutan sebagai macan yang sedang tidur tersebut, sehingga membuatnya paranoid kalau-kalau macan tersebut bangun.

Ada juga yang mengatakan: "Ya nikmati saja Libur Nasional Pilkada Serentaknya, pemilunya *'gak* usah ikut. *Toh* siapapun pemimpinnya sama saja." Sebuah sikap apatis yang sungguh miris, bukan?

Jika kita bersikap demikian, tentu ini dapat menjadi sebuah paradoks. Ketika di satu sisi, kita (baca: umat Kristen) ingin mendapat keadilan di negeri ini, dan mengklaim bahwa umat Kristen bukanlah "penumpang gelap" di negeri Indonesia, dengan menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum (*equality before the law*), namun di sisi lain kita bersikap pragmatis dan apatis.

Karenanya, kita sebagai Gereja perlu menyadari untuk keluar dari kenyamanan “singgasana dan istana” Kristiani kita. Atau meminjam istilah Immanuel Kant, bahwa kita perlu “terbagun dari tidur dogmatis”, yakni kini dengan bersikap kritis dalam merawat kebangsaan, dan menjadikan isu kebangsaan bukan sebuah jalan senyap, melainkan sebuah gerakan bersama.

Pemulihan Atas Trauma Polarisasi di Tengah Perebutan Kekuasaan

Salah satu penyebab apatisme warga negara atau warga gereja terhadap politik di Indonesia disebabkan oleh polarisasi atas politik identitas –misalnya agama– yang ternyata masih menjadi barang laku sebagai “dagangan” politik. Kasus pilgub DKI 2017, intimidasi dalam kegiatan *Car Free Day* karena perbedaan pilihan politik yang terpampang di kaos, tindakan-tindakan persekusi, berita hoax di sosial media, dll membuat sebagian warga trauma, dan memilih untuk tidak kritis dan terbuka terhadap logika politiknya.

Padahal seperti yang dikatakan oleh Niccolo Machiavelli, seorang filsuf yang dikenal menggagas pemikirannya dalam ilmu politik dan filsafat politik, bahwa negara janganlah sampai dikuasai oleh agama. Bagi Machiavelli, agama bukan menjadi tidak penting, melainkan agama dapat mendukung patriotisme dan memperkuat pranata-pranata kebudayaan, namun bukan sebagai kendaraan kepentingan politik yang dapat menyebabkan perpecahan dan perselisihan.

Label haram-halal, kafir-*non* kafir, yang disematkan dalam konstelasi politik di Indonesia, bahkan di level akar rumput, membuat masyarakat terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Bagi mereka yang jengah atas polarisasi akut ini dan ingin menikmati kenyamanan akhirnya menyebrang berbondong-bondong, terhisab ke dalam sebuah kelompok yang disebut “*silent majority*”. Padahal tentu kita menyadari, bahwa politik identitas atas nama agama adalah strategi politik dari para perebut kekuasaan, serta menjadi rombongan besar “*silent majority*” bukanlah pilihan yang tepat bagi kita.

Menurut seorang teolog bernama John Stott, pada akhirnya hanya dua pilihan bagi orang Kristen dalam menentukan sikap terhadap dunia -dalam tulisan ini terhadap isu kebangsaan-. **Pertama**, ialah pelarian, dan yang **kedua** adalah komitmen atau keikutsertaan. Pelarian berarti menyatakan sikap menolak pergumulan dunia, dengan cara berpaling daripadanya, membelakanginya, cuci tangan, bahkan tidak mau tahu. Sebaliknya komitmen dan keikutsertaan berarti dalam keprihatinan kita atas pergumulan dunia, kita menghadapkan wajah kita kepada dunia, membiarkan tangan kita kotor, lecet dalam pelayanan terhadap dunia akibat merasakan dalam lubuk hati kita gejolak kasih Allah yang tak dapat dipendam.

Memiliki komitmen dan keikutsertaan dalam merawat kebangsaan di Indonesia dengan tidak menjadi “*silent majority*”, pada akhirnya adalah sebuah pilihan yang riil bagi kita umat GKI, karena itu adalah panggilan kita sebagai umat Allah. Karena juga dalam membangun peradaban yang baik, tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau golongan saja. Melainkan seluruh komponen harus maju bergerak seirama dalam gerakan bersama.

Tuhan Mencipta Bangsa Indonesia, Warga Turut Merawatnya

Kita sungguh mengimani, bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, yang membenarkan orang-orang berdosa, Juruselamat bagi orang berdosa, “Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya” (Kel 34:6). Tetapi juga Ia adalah Allah yang menghendaki keadilan di tengah bermasyarakat.

Dalam Yeremia 29:7 dikatakan: “Usahkanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada ALLAH, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”. Artinya sebagai umat Allah, kita memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan tempat dimana kita ada, sekalipun kita tidak nyaman di dalamnya, tanggung jawab dan panggilan Allah bagi kita untuk berpartisipasi menghadirkan damai sejahtera tidak dapat diabaikan.

Lahirnya Badan Pelayanan Gerakan Kebangsaan Indonesia di GKI SW Jabar pada Juni 2017,

menjadi alat dan wadah GKI bahwa sebagai sebuah gereja, GKI ingin terlibat secara lebih aktif dalam sebuah gerakan untuk merawat kebangsaan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa: "Kami sudah 'kok sejak dulu terlibat merawat kebangsaan, minimal di kelurahan, kecamatan atau kota dimana kami ada." Namun akhirnya perjuangan dalam merawat kebangsaan ini, menjadi perjuangan per kelompok atau per jemaat, belum menjadi gerakan atas nama yang sama. Atau bahkan menjadi perjuangan beberapa nama pendeta atau penatua atau anggota jemaat tertentu, yang bisa saja tidak mengatasnamakan Jemaat atau Sinode GKI. Akhirnya urusan merawat kebangsaan menjadi urusan personal dan bisa kembali menjadi jalan senyap.

Agar urusan merawat kebangsaan ini, menjadi sebuah gerakan bersama, mari kita persiapkan dan mulai di dalam kehidupan Jemaat kita. Mari kita buat program-program yang bertemakan kebangsaan di dalam program kerja jemaat. Mari kita latih dan dorong umat di Jemaat kita, untuk menyampaikan literasi-literasi kebangsaan di dalam media. Baik lewat status di sosial media, kutipan, artikel, atau bahkan renungan warta. Mari kita buka percakapan-percakapan yang membahas masalah sosial, politik, ekonomi di negeri kita, selepas kita mengikuti kebaktian atau persekutuan. Mari kita masukan kalimat dan pesan kebangsaan di dalam liturgi ibadah, bahkan di dalam khotbah.

Mari kita libatkan partisipasi warga gereja, pada khususnya pemuda di gereja kita untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan. Sementara pemuda-pemuda NU dan Muhammadiyah misalkan, terus melahirkan pemimpin-pemimpin muda, yang fasih dan cakap berbicara di depan umum dalam menyampaikan sikap dan pemikiran tentang Islam Kebangsaan dan NKRI, kita masih terbuai dengan romantisme Eka Darmaputera, Nathan Setiabudi, atau kini Albertus Patty.

Mari kita merawat kebangsaan di Indonesia, tanah dan negeri yang diberikan Tuhan kepada kita.

NKRI Harga Mati! Salam Kebangsaan!

#gkitetapnkri

** Penulis adalah Wakil Ketua BP Gerakan Kebangsaan Indonesia*